



TELE KONSELING TESAGA

Tanya:
Saya seorang ibu rumah tangga yang sudah menjalani pernikahan selama tujuh tahun dengan satu orang anak dan saat ini sedang mengandung anak kedua. Selama tujuh tahun pernikahan sama sekali tidak ada perubahan dari suami saya, perangnya yang temperamental dan mudah marah. Saya sering sekali mendapatkan kekerasan dari suami saya, baik secara fisik ataupun verbal. Terakhir kali saya ditampar oleh suami saya bahkan di depan anak pertama saya, karena saya menegurnya ketika mabuk. Suami saya bukan pemabuk berat namun memang kepribadiannya yang mudah marah. Saya mempertahankan rumah tangga saya hingga sekarang karena saya memikirkan anak-anak saya yang masih kecil, takut mereka kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Saya sekarang tidak tahu lagi harus bagaimana menghadapi suami saya yang tidak kunjung berubah dan kondisi saya yang sedang hamil ini. Rasanya saya sudah tidak kuat namun yang membuat bertahan hingga saat ini hanya anak-anak saya.

Jawab:
Terimakasih banyak ibu sudah bersedia menceritakan apa yang ibu alami. Peristiwa yang dialami ibu saat ini sangat tidak mudah, namun terimakasih sudah berani menceritakan ini kepada kami. Terkadang tidak mudah bagi orang lain untuk menceritakan permasalahannya kepada orang yang belum dikenal. Perlu diketahui ibu, bahwa perilaku kekerasan apapun bentuk dan alasannya sangat tidak dibenarkan. Apalagi hal ini sudah dialami sekian lama oleh ibu. Barangkali memang banyak pertimbangan dibenak ibu sebelum memutuskan untuk berpisah ataupun tetap bertahan dengan suami. Jika ibu kesulitan untuk mengurai permasalahan dan mengambil keputusan barangkali ibu bisa konsultasi dengan profesional terlebih dahulu dengan kondisi ibu saat ini. Seperti di UPT PPA setempat yang dekat dengan tempat tinggal ibu disana dapat diakses dengan layanan konsultasi psikologis, hukum dan fisik tanpa dipungut biaya. Dimana nantinya bisa kami bantu untuk menghubungkan ke P2T2PA tersebut. Disini Ibu sempat menyampaikan bahwa bertahan saat ini karena anak, menurut kami kondisi ibu sendiri juga hal yang utama, mengingat saat ini ibu sedang hamil anak kedua. Jika nantinya terdapat kondisi yang kritis dan mungkin ibu membutuhkan pertolongan segera, maka ibu juga dapat menghubungi SATGAS PPA setempat agar dapat menjangkau ibu lebih cepat. Jika membutuhkan media untuk konsultasi mengenai permasalahan anak dan keluarga anda dapat menghubungi Layanan TeSAGa DIY. Kami akan menjamin kerahasiaan anda. Anda dapat menghubungi kami.

HOTLINE
0877-1929-2111.

Kenalkan Produk UMKM Desa Prima DIY



KR-Istimewa
Pameran Kelompok Ekonomi Produktif (KEP) Desa Prima DIY di Mall Sumarecon Bekasi Jawa Barat.

DINAS Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta (DP3AP2 DIY) bekerjasama dengan Badan Pengembangan Daerah DIY menyelenggarakan Pameran Kelompok Ekonomi Produktif (KEP) Desa Prima DIY di Mall Sumarecon Bekasi Jawa Barat, 20-28 November 2021.

Kegiatan tersebut merupakan pengenalan produk dan karya kelompok perempuan sebagai UMKM yang didampingi DP3AP2 DIY untuk membuka pasar yang lebih besar dari luar daerah. Dengan kegiatan pameran ini diharapkan akan ada tindak lanjut berupa investasi dan transaksi ekonomi yang akan membantu mengembangkan KEP Desa Prima menjadi kelompok UMKM yang maju.

Produk yang ditampilkan pada kegiatan pameran ini telah melewati kurasi produk-produk terbaik dari 115 KEP Desa Prima DIY. Kurasi ini meliputi rasa (makanan), inovasi, kreativitas dan kemasan. Kurasi ini dilakukan selain untuk menjaga kualitas produk juga menjadi bagian dari upaya pembinaan mutu untuk kelompok.

Produk yang ditampilkan beragam mulai dari makanan dan kerajinan. Kerajinan ini bermacam-macam mulai dari batik, shibori, ecoprint, kulit, kerajinan dari akar wangi, bunga-bunga dari plastik dan sebagainya. Sedangkan untuk kuliner beragam mulai dari makanan kering atau camilan juga makanan basah seperti bakpia, wingko, yangko sebagai makanan icon Yogyakarta. Ada juga makanan olahan dari hasil bumi di DIY seperti salah dan rempah rempah menjadi minuman sari salak, manis salak, manis lidah buaya, wedhang mbejai, jamu instans dan sebagainya.

Melalui pameran ini diharapkan promosi dan branding produk KEP Desa PRIMA dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Guna membuka jaringan pasar dan kerjasama baru yang lebih luas. Pada gilirannya ketika ekonomi perempuan menguat, maka dapat menaikkan posisi tawar perempuan di berbagai level mulai dari keluarga hingga pada proses pengambilan kebijakan di level pemerintah. (*)



KR-Devid Permana
Menteri PPPA Bintang Puspayoga (tengah) bersama perwakilan kelompok perempuan penggerak Desa Damai.

0274 565003
087719292111
087719292111

Keluarga Istimewa

Penghargaan yang Diperoleh DP3AP2 DIY Tahun 2019-2021



HARI ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK 2021

Bersama Lindungi dari Jerat Kekerasan

PEREMPUAN di Indonesia rentan mengalami kekerasan, baik di ranah personal maupun kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berdasarkan catatan dari Komnas Perempuan. Yayasan Plan Internasional juga melakukan riset yang mendapat hasil bahwa belasan ribu anak perempuan dari 31 negara, termasuk Indonesia, pernah mengalami kekerasan atau pelecehan secara daring. Fenomena di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menunjukkan perempuan dan anak-anak di Indonesia belum dapat terlindungi secara maksimal. Survey Pengalaman Hidup Perempuan Nasional tahun 2016 menunjukkan bahwa 1 dari 3 perempuan usia 15 – 34 tahun pernah mengalami kekerasan, dimana 1 dari 10 perempuan tersebut menyatakan bahwa kekerasan tersebut dialami dalam 12 bulan terakhir. Di daerah perkotaan, angka kekerasan tersebut cenderung lebih tinggi dari pada di pedesaan. Sementara hasil Survey Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) tahun 2018 menunjukkan sebanyak 1 dari 2 anak laki-laki berusia 13-17 tahun pernah mengalami kekerasan emosional, 1 dari 3 anak

pernah mengalami kekerasan fisik dan 1 dari 17 anak mengalami kekerasan seksual. Sedangkan untuk anak perempuan yang juga berusia 13-17 tahun, 3 dari 5 anak pernah mengalami kekerasan emosional, 1 dari 5 anak pernah mengalami kekerasan fisik, 1 dari 11 anak perempuan mengalami kekerasan seksual. Kondisi ini diperparah dengan sebanyak 76-88 persen anak-anak dan remaja belum mengetahui adanya layanan untuk mengantisipasi kekerasan. "Data Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan DIY sejak Januari 2021 hingga November 2021 mencatat sebanyak 783 perempuan menjadi korban kekerasan dan sebanyak 423 anak yang menjadi korban kekerasan. Masih tingginya angka kekerasan di DIY tentu menjadi keprihatinan kita bersama. Apabila kita menilik sisi budaya DIY yang luhur, tentu tidak akan ditemukan titik pembeneran perilaku kekerasan tersebut," kata Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2 DIY Beni Kusambodo SH. Falsafah hamemayu hayuning bawana yang dipegang erat oleh seluruh unsur di DIY mengajarkan untuk

menjaga kelestarian semesta. Semesta yang dimaksud bukan hanya pada dimensi fisik namun juga pada dimensi nonfisik maupun kosmologi secara utuh. Jogja sejak awal didirikannya telah diatur sebagai sumbu filosofis dengan landscape yang terus mengingatkan setiap individu yang didalamnya untuk berperilaku luhur baik itu saat berhubungan dengan manusia lain maupun dengan Tuhannya. Landscape / tata kota Yogyakarta juga diatur sebagai state pengingat bagi setiap individu untuk memaknai setiap proses tahap perkembangan manusia sebagai tugas mulia yang harus dilaksanakan sesuai kapasitasnya untuk mencapai kemuliaan di akhir kehidupan. Hal ini menunjukkan, falsafah hidup manusia Jogja untuk melestarikan semesta, bukan hanya diajarkan melalui tekstual namun juga kontekstual bahkan sampai pada nilai kehidupan yang terus diupayakan untuk diberikan sebagai pengingat agar menjadi manusia yang mulia. Falsafah sangkan paraning dumadi dan rahayuning manungsa dumadi karena kamanungsané harus mampu mengakar kuat di hati setiap individu masyarakat Jogja agar tidak

kehilangan jati diri di era milenial ini. Sehingga diperlukan upaya reinternalisasi budaya dalam kehidupan sehari-hari bagi seluruh masyarakat DIY. Dalam rangka Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan, tahun ini PBB mengangkat tema "Orange the World: End Violence against Women Now!". Tema tersebut dipilih mengingat kekerasan terhadap perempuan yang meningkat di tengah pandemi Covid-19. Warna orange melambangkan masa depan yang lebih penuh harapan untuk masyarakat yang bebas dari kekerasan bagi perempuan maupun anak. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan tahun ini akan diisi dengan 16 Hari kampanye anti kekerasan terhadap perempuan (16 days of activism). Kegiatan ini akan dimulai pada 25 November dan berakhir pada 10 Desember 2021, bertepatan dengan Hari Hak Asasi Manusia Internasional. Rangkaian kegiatan Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dilakukan dalam rentang 16 hari karena sepanjang 16 hari tersebut juga terdapat peringatan-peringatan yang erat kaitannya dengan perempuan. (*)

Menteri PPPA RI Resmikan DRPPA DIY

DUA wilayah di Kulonprogo, Kapanewon Kalibawang dan Kalurahan Tanjungharjo Kapanewon Nanggulan diresmikan sebagai Kalurahan Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). Peresmian dilakukan langsung Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), I Gusti Ayu Bintang Darmawati pada medio November 2021 lalu. Seperti diketahui, sesuai keputusan Menteri PPPA nomor 70 tentang Penetapan Kabupaten/ Kota Wilayah Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, Kabupaten Kulonprogo dan Sleman menjadi bagian dari 67 Kabupaten yang ditetapkan sebagai DRPPA. "Konsep DRPPA mengintegrasikan perspektif gender dan ramah anak di setiap tata kelola pemerintahan. Demikian juga dalam pembangunan di tingkat desa diharapkan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan," kata Menteri Gusti Ayu Bintang Darmawati. Ada 10 indikator yang harus dipenuhi untuk mewujudkan DRPPA yakni pengorganisasian perempuan dan anak di desa, tersedianya data desa memuat data pilah tentang perempuan dan anak. Selain itu juga tersedianya Perdes tentang DRPPA serta adanya pembiayaan dari keuangan desa dan pendayagunaan aset desa

untuk mewujudkan DRPPA melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di desa. Indikator lainnya, persentase keterwakilan perempuan di pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa. Juga adanya persentase perempuan wirausaha di desa, utamanya perempuan kepala keluarga, penyintas bencana, dan penyintas kekerasan. "Indikator yang lain, semua anak di desa mendapatkan pengasuhan berbasis hak anak. Tidak ada kekerasan terhadap perempuan dan anak (KTPA) dan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Tidak ada pekerja anak dan Tidak ada perkawinan anak. Untuk mewujudkan 10 indikator tersebut, perlu ada sinergi Pemerintah Desa dengan tokoh adat, Agama, dan lainnya," jelasnya. Pada 2022 mendatang, pihaknya akan membangun 142 model DRPPA di 66 Kabupaten di 33 provinsi. "Kalau model DRPPA berjalan baik, nanti bisa direplikasi oleh tiap desa. Kami mohon dukungan Pemda DIY agar replikasi bisa diterapkan di desa/ Kalurahan lain di DIY," ungkapnya. Wakil Gubernur DIY, KGPA A Paku Alam X menjelaskan, desa/kalurahan harus memberi rasa aman dan nyaman pada masyarakatnya khususnya perempuan dan anak dengan memenuhi hak perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Desa/Kalurahan juga perlu tersedianya sarana dan prasarana publik yang ramah perempuan dan anak. "Pemda DIY memiliki harapan melalui visi pemajuan keluarga prima yang berbudaya, maju dan mandiri dalam rangka mewujudkan martabat manusia DIY. Hal ini merupakan tujuan utama pembangunan daerah dalam kaitannya dengan Keistimewaan DIY," ujarnya menambahkan konsep tersebut

bermakna pembangunan manusia tidak hanya fokus pada aspek kognisi tapi juga budi pekerti dan perilaku yang menciptakan manusia adil dalam pikiran dan perbuatan terhadap sesamanya. Sementara Bupati Kulonprogo, Drs Sutedjo menuturkan, upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak telah diupayakan dan dilaksanakan pembekal setempat. Seperti RPJMD, RKPD dan kebijakan-kebijakan berupa perda dan perbup, sudah responsif gender maupun ramah terhadap pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. "Hal ini terbukti dengan diraihnya penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kategori Utama dan Kabupaten Layak Anak (KLA) Kategori Madya dan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) Taman Alun Alun Wates dari Menteri PPPA," katanya. Upaya-upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga sudah diterapkan di tingkat kalurahan. Begitu juga dengan Kalurahan Banjarharjo dan Tanjungharjo yang jadi model DRPPA. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagian besar sudah dilaksanakan. Terutama Banjarharjo selama ini sudah didampingi LSM Kalyana Mitra untuk mewujudkan kalurahan ramah perempuan dan peduli anak. Sebelumnya Menteri PPA didampingi oleh Jamshed M Kazi (Country Representative and Liaison Officer, UN Women) dan Istri Wakil Gubernur DIY Kanjeng Gusti Bendara Raden Ayu (KGBRAY) Paku Alam X berdialog dengan kelompok perempuan penggerak peremajaan Desa Damai di Peace Village, Sinduharjo Sleman. Menurutna Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan Indonesia masih berada di bawah laki-laki. Hal ini menunjukkan masih banyak ketimpangan yang dihadapi perempuan, mulai dari ekonomi hingga kasus kekerasan.

Mencegah Stunting dari Usia Remaja

STUNTING merupakan salah satu isu prioritas nasional. Pemerintah menargetkan penurunan angka stunting secara signifikan agar tercipta generasi yang tumbuh dengan sehat. Stunting adalah kekurangan gizi pada bayi di 1.000 hari pertama kehidupan yang berlangsung lama dan menyebabkan terhambatnya perkembangan otak dan tumbuh kembang anak. Karena mengalami kekurangan gizi menahun, bayi stunting tumbuh lebih pendek dari standar tinggi balita seumumnya. Namun yang harus diingat, stunting itu pasti bertumbuh pendek. Sementara yang bertumbuh pendek belum tentu stunting (BKKBN https://www.bkkbn.go.id/detailpost/indonesia-cegah-stunting). Menurut Buku Data Gender dan Anak DIY Tahun 2021 oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY, angka stunting DIY sesungguhnya sudah menurun dari tahun ke tahun, namun meningkat lagi di tahun 2020. Sebesar 12,37 persen pada tahun 2018, menurun di tahun 2019 menjadi 10,69 persen. Namun sayangnya naik sebesar 0,4 persen di tahun 2020 menjadi sebesar 11,09 persen. Stunting berkaitan erat dengan kondisi sosial ekonomi, paparan suatu penyakit dan asupan gizi yang kurang secara kuantitas dan kualitas (WHO, 2014). Stunting juga berkaitan dengan meningkatnya resiko terjadinya kesakitan dan kematian, perkembangan motorik terlambat, dan terhambatnya pertumbuhan mental (Waterlow, 1994). Anak-anak stunting menghadapi kemungkinan yang lebih besar untuk tumbuh menjadi dewasa yang kurang pendidikan, miskin, kurang sehat dan lebih rentan terhadap penyakit tidak menular (UNICEF, 2004). Hal-hal inilah yang perlu kita waspadai bersama, sehingga kita juga perlu bergerak bersama untuk pencegahan stunting. Pembahasan mengenai stunting sendiri lebih sering dikaitkan dengan ibu makan terus, malas untuk olahraga/malas gerak, merokok, mengonsumsi makanan cepat saji dan rendah nutrisi, tentu saja akan berpengaruh terhadap kesehatan. Bahkan, dari hasil Riset Kesehatan Dasar 2018, masih banyak remaja yang dalam kondisi kurus dan sangat kurus. Selain itu, remaja putri juga banyak yang mengalami anemia defisiensi zat besi yang tentu saja akan memberikan dampak yang tidak baik bagi kondisi tubuhnya. Anemia yang tidak teratasi dan terbawa hingga masa kehamilan bisa mengganggu kesehatan janin, termasuk meningkatkan risiko stunting. Pemahaman itulah yang harus ditanamkan bagi remaja, baik remaja putri maupun remaja putra harus bisa mengatur pola makan dan asupan gizi yang dikonsumsi dan juga menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang dapat merugikan diri sendiri. Selain itu perlu juga dibarengi dengan pemahaman mengenai perencanaan berkeluarga termasuk usia menikah yang ideal. (*)

TeSAGa DIY @TeSAGaDIY TeSAGa DIY TeSAGa DIY